



**LITERATURE REVIEW: SISTEM PENGENDALIAN INTERN, STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH**

**Okta Amiko Naka<sup>1</sup>, Iqbal Hadi Pradana<sup>2</sup>, Aditian<sup>3</sup>, Diva Sintia<sup>4</sup>**

Universitas Muhammadiyah Bengkulu<sup>1,2,3,4</sup>

[oktao6240@gmail.com](mailto:oktao6240@gmail.com)

**INFORMASI ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 12/12/2024

Direvisi : 25/12/2024

Disetujui : 30/12/2024

**Keywords:**

*Quality of Financial Reports,  
Internal Control Systems and  
Government Accounting  
Standards*

**Kata Kunci:**

Kualitas Laporan  
Keuangan, Sistem Pengendalian  
Intern Dan Standar Akuntansi  
Pemerintah

**ABSTRAK:**

*This study uses the Agency Theory approach that views the village government as an agent and the community as the principal. Within this framework, the village government is expected to be able to carry out financial accountability in accordance with the Government Accounting Standards (SAP) as regulated in PP No. 71 of 2010, which includes seven main accountability reports. The methodology of this study is the Systematic Literature Review (SLR) which involves the identification, evaluation, and interpretation of previous research results from 2020 to 2023, with data sources from Mendeley and Google Scholar. The results of the study indicate that the implementation of accrual-based SAP and the government internal control system (SPIP) have a significant influence on the quality of government financial reports. Accrual-based SAP helps improve transparency, efficiency, and accountability in financial management. Meanwhile, SPIP can minimize fraud and ensure better financial opinions, such as Fair Without Exceptions. The conclusion of this study is that good financial management through the implementation of SAP and effective internal control can improve the quality of government financial reports, provide accurate information, and support appropriate decision making.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Keagenan yang memandang pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam kerangka ini, pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010, yang mencakup tujuh laporan pertanggungjawaban utama. Metodologi penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR) yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi hasil penelitian terdahulu dari tahun 2020 hingga 2023, dengan sumber data dari Mendeley dan Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. SAP berbasis akrual membantu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sementara itu, SPIP dapat meminimalisir kecurangan dan memastikan opini keuangan yang lebih baik, seperti Wajar Tanpa Pengecualian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan keuangan yang baik melalui penerapan SAP dan pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, memberikan informasi akurat, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

**PENDAHULUAN**

Pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai, masyarakat Indonesia masih kecewa. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan instansi terkait, namun masyarakat mengetahui bahwa hasilnya belum maksimal atau bahkan terkesan setengah hati. Oleh karena itu, korupsi masih terjadi di Indonesia. Atas lemahnya laporan keuangan pemerintah



mengakibatkan potensi korupsi di Indonesia makin banyak terjadi. Maka diperlukan laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan pemerintah Indonesia akan lebih baik jika mengikuti standar akuntansi pemerintah. Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan SAP, dan pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemerintah menggunakan SAP berbasis akrual untuk melihat hasil kegiatan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan alat yang digunakan untuk melihat apakah APBN/APBD dilaksanakan atau tidak, hal ini tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berpengalaman dan pengetahuan tentang tata cara penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Ayu & Kusumawati, 2020; Lantu<sup>1</sup> et al., 2023; Launtu, 2021; Mudrikah & Ali, 2020). Sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan kompetensi SDM adalah kemampuan melaksanakan tugas secara efisien dan efektif, yang berarti mampu menangani korupsi secara efektif. Tujuan pengembangan SDM adalah untuk mengurangi kinerja buruk, mengurangi adanya korupsi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, meningkatkan komitmen karyawan, serta mengurangi turnover dan absensi. Kompetensi SDM sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan tenaga kerja yang baik, untuk mencapai tujuan ini, mereka harus membangun budaya pengendalian internal (Anto et al., 2022).

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi untuk membantu suatu organisasi mencapai tujuannya. Sumber daya dapat dikelola, dipantau, dan dinilai melalui pengendalian internal (Ayu & Kusumawati, 2020). Pengendalian internal sangat penting untuk melindungi sumber daya organisasi, baik yang berwujud (seperti mesin dan tanah) maupun tidak berwujud (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual, seperti merek dagang), serta mencegah dan mendeteksi penggelapan. Salah satu tujuan pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan suatu perusahaan, organisasi, atau entitas mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan mematuhi peraturan dan undang-undang, dan laporan keuangannya dapat dipercaya. Dengan memberikan informasi tentang cara menilai kinerja dan manajemen perusahaan serta memberikan informasi yang akan dijadikan pedoman dalam perencanaan, pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan dalam pengolahan sumber daya perusahaan. Sistem pengendalian intern pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pemerintah pusat dan daerah menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2. Sistem pengendalian intern sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan daerah dan merupakan faktor pendukung terbangunnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai wujud kebaikan, pertunjukan.

Rencana dan teknik organisasi yang digunakan untuk memelihara atau melindungi aset, menghasilkan informasi yang akurat dan andal, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kebijakan manajemen dilaksanakan dengan benar dikenal sebagai pengendalian internal (Krisniaji, 2010:218). Setiap langkah dan tindakan dilakukan secara berkala untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengendalian internal tidak hanya memeriksa data statistik; mereka juga melihat bagaimana suatu organisasi diorganisir, meningkatkan efisiensi kinerja, dan mengevaluasi kebijakan manajemen yang tidak efektif. Oleh karena itu pengendalian internal harus dipantau dan dievaluasi agar berhasil dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang



Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pemerintah daerah harus merumuskan metode untuk meningkatkan sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (Ayu & Kusumawati, 2020) (Damayanti, 2020) (Anto et al., 2022).

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan pada saat membuat dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah. Operasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Pemerintah akan memperoleh informasi yang berkualitas dengan menerapkan standar akuntansi yang baik karena laporan keuangan pemerintah harus memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Sebuah penelitian (Nugraheni & Subaweh, 2011) menemukan bahwa laporan keuangan yang disusun menggunakan standar akuntansi pemerintahan lebih baik. Salah satu syarat yang sangat penting yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan adalah kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik harus dapat digunakan untuk menilai keputusan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Hal ini menjadi dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan negara sebagai sinyal kebijakan keuangan untuk menciptakan penyelenggaraan kekuasaan, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur pemerintahan secara keseluruhan, dan mendorong kemajuan perekonomian. Prinsip pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu prinsip yang harus terus dikembangkan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik, sistem dan lembaga harus diperkuat dengan peraturan dan standar hukum untuk menyiapkan laporan keuangan yang benar dan akuntabilitas. Permasalahan kualitas laporan keuangan saat ini menjadi semakin penting. Beberapa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang buruk di Indonesia masih menjadi permasalahan besar dan perlu diteliti lebih lanjut. Semua laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Munculnya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern, serta masih kurangnya pengawasan auditor internal. Hal ini berdampak negatif terhadap laporan keuangan pemerintah pusat. (Lantu<sup>1</sup> et al., 2023; Munggaran et al., 2021; Sari & Wahyuni L, 2023).

Menurut penelitian Transparansi et al.,(2022) sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa, menurut penelitian Munggaran et al., (2021) sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan menurut(Ridzal et al., 2022) sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pengelolaan desa. Menurut penelitian Munggaran et al., (2021) bahwa standar akuntansi pemerintahan telah memberikan kontribusi yang positif terhadap kualitas laporan keuangan, menurut penelitian Lantu<sup>1</sup> et al., (2023) Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, menurut penelirian Ayu & Kusumawati, (2020) Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, menurut penelitian Tegor et al., (2021) standar akuntansi pemerintahan berpengaruh tidak langsung terhadap laporan keuangan pemerintah, menurut penelitian Sari & Wahyuni L, (2023) standar akuntansi pemerintah dengan basis akrual memiliki hasil yang positif dengan kualitas laporan keuangan, menurut (Munggaran et al., 2021) standar akuntansi pemerintahan telah memberikan kontribusi yang positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan (Sutrisno & Astuti, 2024) Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak memiliki pengaruh signifikan atau memiliki pengaruh signifikan tetapi sangat kecil terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan SLR (Sytematic Literature Review) adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Metode SLR mencakup kegiatan seperti pengumpulan data perpustakaan, metode membaca dan mencatat, serta metode pengelolaan bahan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan studi jurnal yang telah dilakukan. Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR) adalah teknik yang melibatkan identifikasi, penilaian, evaluasi, dan interpretasi seluruh hasil penelitian sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk melakukan tinjauan literatur secara sistematis, penelitian mengenai pengaruh penerapan etika bisnis dengan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan perbankan konvensional harus diklasifikasi, diidentifikasi, dikumpulkan dan dianalisis. Metode SLR (Sytematic LiteratureReview) berasal dari berbagai aplikasi online antara lain Mendeley dan Google Scholar. Artikel LiteratureReview ini menggunakan data sebagai acuan penulisan artikel terbitan tahun 2020 hingga tahun 2023.

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan. Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan ke dalam “anak sub-judul” pada bagian ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, cara penulisan dapat dilihat pada bagian “Hasil dan Pembahasan”. Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan ke dalam “anak sub-judul” pada bagian ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, cara penulisan dapat dilihat pada bagian “Hasil dan Pembahasan”.

**Tabel 1.**

**Ringkasan Penelitian tentang Pengaruh Faktor-Faktor Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah**

No	Peneliti dan tahun terbit	Judul	Hasil penelitian
1	(Transparansi et al., 2022)	Pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan



		desa	pemerintah desa.
2	(Munggaran et al., 2020)	Pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem Pengendalian intern pemerintah dan auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sampai batas tertentu, sedangkan peran auditor internal tidak memiliki pengaruh parsial terhadap kualitas laporan keuangan
3	(Anggara et al., 2020)	Pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, moralitas individu, dan integritas terhadap Kecenderungan kecurangan (fraud) pada pengelolaan keuangan desa	sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pengelolaan desa
4	(Munggaran et al., 2021)	Pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem Pengendalian intern pemerintah dan auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Mengenai kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan telah memberikan kontribusi yang positif terhadap kualitas laporan



			keuangan.
5	(Lantu <sup>1</sup> et al., 2023)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten minahasa utara	Penerapan SAP Berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan
6	(Ayu & Kusumawati, 2020)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan Pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Gianyar	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual maka Kualitas Laporan Keuangan juga akan meningkat
7	(Tegor et al., 2021)	Penerapan standar akuntansi dan kualitas aparatur terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh tidak langsung terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
8	(Sari & Wahyuni L, 2023)	Analisis pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kinerja sdm terhadap kualitas laporan	Standar akuntansi pemerintah dengan basis akrual memiliki



		keuangan (studi kasus dinas lingkungan hidup provinsi sumatera utara)	hasil yang positif dengan kualitas laporan keuangan
9	(Munggaran et al., 2021)	Pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem Pengendalian intern pemerintah dan auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	standar akuntansi pemerintahan telah memberikan kontribusi yang positif terhadap kualitas laporan keuangan
10	(Sutrisno & Astuti, 2024)	Pengaruh penerapan standar akuntansi Pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada badan siber dan sandi negara	Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak memiliki pengaruh signifikan atau memiliki pengaruh signifikan tetapi sangat kecil terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Munggaran et al., 2021). Dengan memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah, diharapkan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah akan menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal dapat membantu mencegah tindakan yang melanggar hukum. Dengan cara ini, implementasi dan pengembangan dapat mencapai efisiensi, keuntungan dan ekonomi. Auditor internal harus memantau dan memberikan jaminan kualitas selain menerapkan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik (Munggaran et al., 2021)

### Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan, untuk itu pemerintah yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan perlu meningkatkan aspek pengawasan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah (Lantu<sup>1</sup> et



al., 2023). Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan menerbitkan PP no. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi pengelolaan keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Tujuan penggunaan basis akrual adalah: meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan), meningkatkan pengendalian fiskal (manajemen aset), meningkatkan akuntabilitas program pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa, informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan, mereformasi sistem anggaran belanja dan transparansi yang lebih besar mengenai biaya layanan yang disediakan oleh pemerintah (Kusumawati, 2020).

### **Kualitas Laporan Keuangan PEMERINTAH**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan dikatakan berkualitas jika relevan, kredibel, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan standar yang harus dimasukkan ke dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuannya (Ayu & Kusumawati, 2020). Dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang benar, dipastikan dapat mengubah cara pemerintah menyajikan laporan keuangan. Pencatatan keuangan yang baik tergantung pada kemampuan bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan membuat laporan keuangan (Wahyuni L, 2023).

### **SIMPULAN**

Sistem pemeriksaan internal (SPIP) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, memastikan pendapat pemerintah didengar dan dilaksanakan secara efektif. Auditor internal harus menjaga kualitas dengan tetap berpegang pada standar pelaporan keuangan yang baik. Pemerintah sebaiknya mengikuti PP No. 24 Tahun 2005 dan PP no. 71 Tahun 2010 untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Penggunaan basis keuangan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Laporan keuangan harus relevan, kredibel, dan mudah diakses. Memastikan pelaporan keuangan yang baik dapat membantu pemerintah memberikan informasi yang akurat dan mengambil keputusan yang tepat.

### **DAFTAR PUSTAKA:**

- Anggara, M. R., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Integritas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(4), 561–572.
- Anto, H., Alamsyah, S., & Indrawan, A. (2022). Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 19(2), 184. <https://doi.org/10.30651/blc.v19i2.13522>
- Ayu, P. C., & Kusumawati, N. P. A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 113–126. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i1.555>
- Damayanti, I. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten



- Semarang). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 95–102. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1852.95-102>
- Lantu<sup>1</sup>, F. T., Pangkey<sup>2</sup>, R. I. J., Sumampouw<sup>3</sup>, O., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2023). Kabupaten Minahasa Utara. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 4(1), 91–97.
- Launtu, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 18(1), 14–27. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1318>
- Mudrikah, F., & Ali, K. (2020). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Fidusia*, 3(2), 166–182. [www.Opsi.id](http://www.Opsi.id),
- Munggaran, A. K., Yusuf, M., Akuntansi, M., & Pancasila, U. (2021). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Artikel info Pendahuluan Saat ini , masalah kualitas laporan keuangan menjadi semakin penting . Beberapa kas. 1(4)*.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner*, 6(3), 2944–2954. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Sari, A., & Wahyuni L, A. (2023). Analisis Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Kinerja SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 59–66. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.19035>
- Sutrisno, S., & Astuti, I. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Siber Dan Sandi Negara. *Aliansi : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 18(2), 185–198. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v18i2.532>
- Tegor, T., Juliza, Yusmalina, Y., & Haqiqi, F. (2021). Penerapan Standar Akuntansi Dan Kualitas Aparatur Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun). *Jurnal Cafeteria*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v2i1.276>
- Transparansi, D. A. N., Kualitas, T., & Erawati, T. (2022). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi kasus pada Desa di kecamatan Pakem kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 10(01), 17–25. <https://doi.org/10.26460/ja.v11i1.2990>